

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Reformasi telah membawa perubahan terhadap aspek-aspek kehidupan di Indonesia, baik dari segi sistem politik, ekonomi, hukum, budaya dan aspek lainnya telah mengalami pergeseran struktur sejak informasi bergulir. Perubahan sistem yang multidimensi seperti ini telah menjadikan perubahan peta kekuatan politik baik di pusat maupun di daerah, yang menuntut adanya suatu kestabilan politik yang dinamis.

Salah satu implikasi dari reformasi tersebut adalah perubahan sistem kepartaian, segala aspek kebebasan berpolitik telah memberikan kesempatan pada aktor reformasi untuk mensosialisasikan dan merekrut anggota hingga membentuk suatu organisasi kemasyarakatan maupun partai politik, yang merupakan prasyarat negara demokratis.

Dewasa ini sulit membayangkan adanya negara modern tanpa eksistensi partai politik. Partai politik bukan hanya berperan sebagai saluran aspirasi politik berbagai kelompok masyarakat dan sebagai wahana untuk mengartikulasikan tuntutan politik dalam sistem politik secara keseluruhan, tetapi juga berfungsi sebagai jenis organisasi yang berkompetisi untuk membentuk kabinet pemerintahan.

Partai politik dalam pelaksanaannya melakukan fungsi-fungsi partai politik yang salah satunya adalah komunikasi politik. Selain itu partai politik juga berfungsi sebagai sarana komunikasi politik dan rekrutmen politik, sedang dalam

aplikasi proses sosialisasi politik dan rekrutmen politik tergantung pada komunikasi politik. Justru itu komunikasi politik menyentuh semua aspek sistem politik.

Menurut Almond dan Powell dalam Ardial (2009: 30 ) berpendapat bahwa “Komunikasi politik sebagai salah satu fungsi politik dalam sistem politik, bahkan komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi- fungsi lain seperti artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen.”

Sebuah sistem harus berjalan dengan baik dan saling mendukung agar isi pesan tersampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun dalam pelaksanaannya, komunikasi politik sering mengalami permasalahan. Pelaksanaan komunikasi politik membutuhkan saluran yang tepat agar tidak terjadi miskomunikasi. Saluran ini bisa berupa media elektronik maupun cetak. Saluran komunikasi politik ini merupakan sarana penghubung antara komunikator dan komunikan. Agar komunikasi politik dapat berjalan dengan baik perlu adanya hubungan baik antara orang-orang yang ada dalam partai politik tersebut.

Menurut Ramlan Surbakti (2010:152) komunikasi politik adalah “Proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.”

Fungsi komunikasi politik tersebut dilakukan oleh semua anggota partai politik sebagai partisipan aktif dipartai politik dan juga komunikator dalam menyampaikan isi informasi. Dalam hal ini anggota partai politik yang berperan

sebagai komunikator harus dapat menyampaikan informasi secara benar dan tepat terhadap *audiens* atau pendengar, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dari atas kebawah dan sebaliknya.

Partai politik sebagai media untuk komunikasi politik, yang menghubungkan atau mengagregasikan antara pemerintahan dengan masyarakat. Partai adalah corong bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif atas pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Agar terhindar pula dari kesewenang-wenangan pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat pada umumnya karena sangat berkaitan sekali dengan kesejahteraan masyarakat sebagai obyek dari aturan.

Partai akan memediasi masyarakat dengan pemerintah untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kehidupan yang lebih baik. Karena seluruh aspirasi masyarakat akan di akomodir oleh partai melalui wakil-wakilnya di parlemen. Ini merupakan salah satu fungsi partai politik dalam menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat.

Namun yang menjadi permasalahannya saat ini, pelaksanaan komunikasi politik yang dilaksanakan oleh partai politik tidak lagi dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Dairi. Partai politik di Kabupaten Dairi tidak lagi menjalankan fungsi komunikasinya kepada masyarakat. Dampak yang dihasilkan dari permasalahan diatas ialah terjadinya miskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Bahkan dampak yang terlihat jelas adalah adanya sikap apatis masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Dairi.

Pemahaman akan fungsi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik sepenuhnya belum dijalankan oleh partai politik yang ada di kabupaten Dairi. Dalam negara yang demokratis, seharusnya partai politik ( bukan pemenang pilkada) juga harus menjalankan fungsi komunikasi politiknya dengan sebaik-baiknya. Komunikasi politik berfungsi dalam meneruskan aspirasi masyarakat dari infrastruktur kepada suprastruktur politik. Dalam hal ini komunikasi politik merupakan proses yang berjalan dari satu subsistem ke subsistem lain dalam sistem politik secara berkesinambungan. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa partai politik yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Untuk menyelesaikan permasalahan diatas maka PDI-Perjuangan hadir ditengah masyarakat.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) merupakan salah satu partai dominan di Kabupaten Dairi. Mengaku hadir sebagai bagian dari rakyat dan tidak hanya sebagai bentuk formalitas dari partai lainnya, PDI-Perjuangan telah berkembang diseluruh daerah termasuk Kabupaten Dairi yang berada di Sumatera Utara. Sebagai salah satu partai dominan PDI-Perjuangan memiliki peran penting dalam memberikan pengaruh dan fungsi politik kepada pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Dairi. Partai yang kini memiliki nama besar di Kabupaten Dairi tersebut memiliki komitmen dalam menjalankan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan kajian lebih lanjut terhadap peranan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi komunikasi politik khususnya di

Kabupaten Dairi yang kemudian diangkat menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul “ **Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Menjalankan Fungsi Komunikasi Politik di Kabupaten Dairi**”.

### ***B. Identifikasi Masalah***

Menurut Sugiyono (2010:385) “ identifikasi masalah adalah melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti, melakukan observasi dan wawancara keberbagai sumber, sehingga permasalahannya dapat diidentifikasi.”

Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan identifikasi masalahnya. Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi identifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Belum terwujudnya peran partai politik dalam menjalankan fungsi komunikasi politik
2. Kurang efektifnya kinerja partai politik dalam menjalankan fungsi komunikasi politik

### ***C. Pembatasan Masalah***

Menurut Sugiyono (2010:385) “batasan masalah adalah membatasi ruang lingkup yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitan lebih dapat focus untuk dilakukan, serta meneliti antara variabel yang satu dengan yang lain. Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah : kurang efektifnya kinerja partai politik dalam menjalankan fungsi komunikasi politik di Kabupaten Dairi.

#### ***D. Rumusan Masalah***

Dalam penelitian perlu ditegaskan dan dirumuskan masalah yang akan diteliti. Maka yang menjadi rumusan masalah yang dapat dibuat peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana kinerja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menjalankan fungsi komunikasi politik di Kabupaten Dairi

#### ***E. Tujuan Penelitian***

Sejalan dengan pembatasan masalah dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : Mengetahui kinerja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menjalankan fungsi komunikasi politik.

#### ***F. Manfaat Penelitian***

Adapun yang menjadi manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan bisa menambah pengetahuan dan memperkaya keilmuan khususnya di ilmu-ilmu sosial di Universitas Negeri Medan.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang baru sehingga lebih memahami arti penting dari komunikasi politik khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Dairi.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan berpikir khususnya dalam bidang kajian ilmu politik

